



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS BRAWIJAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD FAISAL RIZA
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG UMUM, KEUANGAN, DAN SUMBER DAYA
3. NHK : 873930

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.645.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 232 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , WARISAN Rp. 1.920.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 405 m2/134 m2 di KAB / KOTA MALANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.150.000.000		
3. Tanah Seluas 185 m2 di KAB / KOTA MALANG, WARISAN Rp. 375.000.000		
4. Tanah Seluas 190 m2 di KAB / KOTA MALANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 200.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	330.000.000
1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	23.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	30.358.745
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.028.358.745
III. HUTANG	Rp.	105.528.600
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.922.830.145

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.